

Peran Fungsi Partai Politik Terhadap Lingkungan Hidup

Muhammad Catur U

Rina Martini

Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedharto Semarang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dalam kaitan fungsi partai politik Gerindra di Kota Semarang terhadap lingkungan hidup, dan untuk mengetahui komitmen ketua partai Gerindra di Kota Semarang dalam membawa partainya untuk lebih peka terhadap lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan hasil temuan didapatkan bahwa partai Gerindra kota Semarang secara umum menjalankan fungsi partai dengan memerhatikan aspek lingkungan hidup juga komitmen yang tinggi dari ketua partai Gerindra kota Semarang untuk membawa partainya lebih peduli terhadap lingkungan hidup.

Kata kunci: fungsi, partai politik, gerindra, lingkungan hidup

This study aims to find how the role of the Gerindra political party in Semarang City is related to the environment and to determine the commitment of the Gerindra party chairman in Semarang City in bringing his party to be more sensitive to the environment. This study uses a qualitative method and the findings show that the Gerindra party in the city of Semarang in general carries out the function of the party by paying attention to environmental aspects as well as a high commitment from the chairman of the Gerindra party in the city of Semarang to bring his party more concerned about the environment.

Keywords: function, political party, gerindra, environment

PENDAHULUAN

Dekade akhir ini semakin marak kejadian-kejadian tidak baik terkait lingkungan hidup yang sebenarnya akibat ulah manusia itu sendiri, kejadian yang cukup viral terakhir misalnya banjir rob di daerah Semarang Utara mungkin ada di

antara kita mengatakan ini tidak bisa hanya daerah tertentu apalagi kecil yang bertindak tetapi seluruh daerah di muka bumi yang dihuni oleh manusia karena air laut saling terhubung. Jawabannya, kalau daerah yang terkecil saja tidak memiliki

kesadaran akan hal itu maka sulit untuk menjadi meluas dampaknya, bukankah ada perkataan hal yang besar dimulai dari yang kecil? penulis berasumsi hal ini bisa sedikit atau bahkan besar terbantu jika ada kesadaran yang kuat dari partai politik untuk turut serta lewat kader di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), lewat calon yang akan diusungnya, atau lewat kader-kadernya yang tidak di legislatif maupun eksekutif untuk lebih peka terhadap lingkungan hidup yang harapannya akan lahir kebijakan yang menyayangi lingkungan hidup tanpa harus ditekan, didemo, diboikot, dan lain sebagainya oleh masyarakat terdampak atau oleh masyarakat yang peduli.

Fungsi partai politik yang umumnya dibagi menjadi empat begitu baik jika berjalan semestinya, maksud penulis dengan sebegitu pentingnya partai politik tentu akan menjadi bumerang jika partai politik tidak menjalankan fungsinya dengan baik terutama kaitannya dengan lingkungan hidup yang penyusun singgung di awal. Tanpa diawali kesadaran bahwa lingkungan hidup

kita sudah rusak tentu sulit rasanya menjadikan partai politik instrumen penting untuk melakukan perbaikan lingkungan hidup. Bagaimana memaksimalkan partai politik dalam kaitan fungsinya untuk melahirkan kebijakan, program, kader yang mengkomunikasikan, dan rekrutmen politik yang peka terhadap lingkungan hidup.

Oleh karena itu, penulis tertarik ingin mengangkat tema ini yakni peran partai politik di Kota Semarang khususnya partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dalam kaitan fungsinya terhadap lingkungan hidup. Penulis ingin mengetahui sejauh mana fungsi partai politik Gerindra di Kota Semarang berjalan untuk perbaikan lingkungan hidup, juga sejauh mana komitmen nahkoda partai politik untuk tingkat lokal tersebut mendorong partainya untuk lebih peka terhadap lingkungan hidup, yang muaranya juga untuk kehidupan manusia itu sendiri.

Menurut Pamungkas (2011: 15) fungsi partai politik tidak selalu konstan, namun mengalami transformasi. Namun, bukan berarti

tidak ada bentuk umum terkait apa fungsi partai politik itu sendiri. Beberapa ilmuwan politik sudah memetakan apa fungsi partai politik itu sendiri. Konsep V.O. Key tentang tiga elemen partai dalam Pamungkas:

- Partai di masyarakat pemilih,
- Partai sebuah kumpulan orang,
- Partai di lembaga publik.

Tiga bagian partai politik menurut Dalton dan Wattenberg,

1. Kumpulan orang aktif di partai,
2. Perwakilan orang partai di pemerintahan,
3. Partai di kalangan pemilihnya.

Semua itu saling terhubung satu sama lain. Partai sebagai organisasi berfungsi sebagai rekrutmen calon pemimpin politik dan mencari orang yang akan duduk di pemerintah, pendadaran ujung tombak partai politik, pelaksanaan kepentingan politik dan, pengagregasian kepentingan politik. Partai di pemerintahan berfungsi membuahahkan/memperbanyak orang di pemerintahan, pengaturan

pemerintahan, melaksanakan tujuan kebijakan, mengolah ketidaksetujuan dan lawan politik, memastikan tanggung jawab tindakan pemerintah, kontrol terhadap pengelolaan pemerintahan dan memperkuat pemerintahan dari kegoyahan. Sedangkan, partai di elektorat berfungsi meminimalkan pilihan bagi pemilih, mendidik warga negara, memberitahukan, dan merayu masyarakat untuk bersikap tertentu, membangkitkan kesetiaan serta mendorong masyarakat berpartisipasi.

Meny dan Knapp (1998) mengatakan fungsi partai politik sebagai sarana mendorong dan integrasi, ajang pembuatan pengaruh perilaku pemilih (*voting patterns*), ajang rekrutmen politik dan, ajang elaborasi pilihan-pilihan program. Sedangkan, Caton masih dalam Pamungkas (2011) berpendapat fungsi partai politik dalam negara demokrasi memiliki empat guna, artikulasi kepentingan: mengelaborasi pembuatan program-program dan kebijakan pemerintah yg konsisten, agregasi kepentingan: mengambil aspirasi masyarakat dan

mengemasnya, rekrutmen: memilih dan mendidik seseorang untuk tempat di eksekutif dan legislatif, mengawasi & mengontrol pemerintah. Empat inilah juga yang digunakan penyusun sebagai pisau analisis dalam menulis skripsi ini.

Fungsi partai politik dalam pihak pemerintah khususnya lanjut Caton, artikulasi yang telah disebutkan memiliki makna melaksanakan kebijakan, agregasi maknanya melanggengkan dukungan pada pemerintah, dan rekrutmen maknanya mengisi posisi-posisi di pemerintah. Sedangkan, dalam pihak oposisi artikulasi memiliki makna mengembangkan alternatif kebijakan, agregasi memperoleh dukungan untuk perubahan, rekrutmen membangun kumpulan orang-orang kompeten. Artikulasi, agregasi, dan rekrutmen adalah fungsi yang fundamental, partai bermain di proses politik secara berbeda ketika sebagai pemerintah atau oposisi. Fungsi ke empat, mengawasi dan mengontrol pemerintah tergantung pada sistem politik. Sistem parlementer fungsi ini hanya dilakukan oleh oposisi, sedangkan presidensial semua partai

di legislatif menjalankan fungsi pengawasan (relasi eks-legislatif mutual independen, relasi *check and balances*).

Menurut Budiardjo (2010) fungsi partai politik di iklim demokrasi memiliki empat fungsi yakni, sebagai ajang saluran pertukaran informasi politik, ajang memasyarakatkan politik, ajang seleksi politik, dan ajang penengah perselisihan.

Penelitian sebelumnya dari Supratiwi tentang kepedulian partai politik di kota Semarang terhadap politik yang pro lingkungan menyebutkan bahwa partai politik di kota Semarang kurang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, sedangkan tentang kebaruan penelitian ini bisa dibilang baru sebab penelitian ini spesifik untuk partai politik tertentu tetapi tetap di kota Semarang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berdasarkan permasalahan yang diteliti, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian

metode kualitatif adalah cara mengeksplorasi dan memahami makna yang—oleh sejumlah individu atau sekelompok—dianggap berasal dari masalah masyarakat. Cara penelitian kualitatif ini mengikutsertakan sarana-sarana penting, seperti memberi pertanyaan-pertanyaan dan cara-cara, mengumpulkan data yang sesuai dari narasumber, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menjelaskan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapa pun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus pada makna individual, menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan¹. Penelitian ini dilakukan di partai politik Gerakan Indonesia Raya di Kota Semarang yang memiliki perolehan sebanyak enam kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang periode 2019 – 2024

dari total lima puluh kursi. Partai ini terhitung baru dan sejak awal berdiri perolehan kursi di DPRD Kota Semarang cukup baik dan stabil. Juga, di periode ini partai Gerindra dipihak pemerintah harapannya apa yang dipegang terejawantah pada program pemerintah untuk informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Kota Semarang Bapak Joko Santoso, S.E., M.M. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa data kualitatif yaitu wawancara sedangkan teknik analisis data menghubungkan data yang tersedia dengan teori yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapat Caton dalam Pamungkas (2011) fungsi partai politik dalam negara demokrasi memiliki empat guna, artikulasi kepentingan: mengembangkan program-program dan kebijakan pemerintah yang konsisten, agregasi kepentingan: mengambil tuntutan

¹ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Cet. I. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), Hlm. 5.

masyarakat dan membungkusnya, rekrutmen: menyeleksi dan melatih orang untuk posisi-posisi di eksekutif dan legislatif, mengawasi dan mengontrol pemerintah. Empat inilah juga yang digunakan penyusun sebagai pisau analisis dalam menulis skripsi ini.

Fungsi partai politik dalam pihak pemerintah khususnya lanjut Caton, artikulasi yang telah disebutkan memiliki makna melaksanakan kebijakan, agregasi maknanya melanggengkan dukungan pada pemerintah, dan rekrutmen maknanya mengisi posisi-posisi di pemerintah. Sedangkan, dalam pihak oposisi artikulasi memiliki makna mengembangkan alternatif kebijakan, agregasi mendapatkan dukungan untuk perubahan, rekrutmen membangun kelompok orang kompeten. Artikulasi, agregasi, dan rekrutmen adalah fungsi yang fundamental, partai bermain di proses politik secara berbeda ketika sebagai pemerintah atau oposisi. Fungsi ke empat, mengawasi dan mengontrol pemerintah tergantung pada sistem politik. Sistem parlementer fungsi ini hanya dilakukan oleh oposisi,

sedangkan presidensial semua partai di legislatif menjalankan fungsi pengawasan (relasi eks-legislatif mutual independen, relasi *check and balances*).

Fungsi Partai Politik dalam bingkai terkait lingkungan hidup,

1. Agregasi Kepentingan: mengambil tuntutan masyarakat dan membungkusnya serta melanggengkan dukungan pada pemerintah.

Partai Gerindra memandang komitmen untuk peduli terhadap lingkungan hidup adalah kewajiban partainya sebab di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya salah satu tujuan partainya adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, lanjut beliau termasuk di dalamnya lewat kepedulian terhadap lingkungan hidup,

“...tentu kita juga harus ada rule yang kita turuti yaitu AD ART dari berpijak dari yang tadi tentu karena sebuah partai tujuan yang pertama adalah mewujudkan masyarakat yang adil

dan sejahtera tentu di dalam mewujudkan cita-cita luhur itu kan ada bagian dari sebuah apa...proses yang harus ditempuh salah satunya adalah memperjuangkan atau lingkungan...”

Cara partai Gerindra mengagregasi kepentingan sebagai bentuk menjalankan fungsi partai adalah dengan mengecek apakah benar atau tidak, tidak semua aspirasi utuh disampaikan oleh partai ke eksekutif.

“...aspirasi kita tampung semua cuman tentu kita di tengah ini sebagai penampung aspirasi kita akan memilah dulu apakah ini benar atau tidak, tidak semua harus kita sampaikan kepada pemerintah nda kita saring dulu kita olah yang berkaitan dengan kita luruskan dulu lah aspirasi itu baru kita akan sampaikan ke pemerintah...”

2. Artikulasi Kepentingan: mengembangkan program-program dan kebijakan pemerintah yang konsisten, serta melaksanakan kebijakan.

Partai Gerindra memiliki kekhawatiran terkait isu lingkungan hidup sehingga partai berani bahwa apapun yang terkait isu lingkungan hidup partai akan ungkap untuk nantinya diteruskan ke eksekutif.

“Memiliki kekhawatiran. Ya jadi tidak hanya lingkungan hidup ya tapi semuanya yang berkaitan dengan kemasyarakatan pasti kita akan ungkap apalagi untuk hal yang mensejahterakan termasuk lingkungan hidup ini kan isu-isu yang sangat strategis, strategis maksudnya untuk hidup yang layak, hidup yang layak itu salah satu faktornya adalah lingkungan hidup yang layak sehat...”

Partai Gerindra tidak mengembangkan program-program terkait lingkungan hidup sebab menurut beliau partai hanya bertugas mendukung program yang pemerintah buat, bisa dikatakan partai tidak membuat alternatif program untuk nantinya diberi masukan kepada pemerintah.

“...jadi kita itu lebih banyak supporting apa yang dilakukan oleh

pemerintah tetapi kita juga fungsi pengawasan kita yang akan kita maksimalkan tapi kalau program kegiatan riilnya nyatanya itu ada di pemerintah.”

3. Rekrutmen: menyeleksi dan melatih orang untuk posisi-posisi di eksekutif dan legislatif, serta mengisi posisi-posisi di pemerintah.

Partai Gerindra mempunyai indikator penilaian tertentu terkait kepekaan terhadap lingkungan hidup ketika merekrut/menyeleksi orang untuk di eksekutif/ legislatif.

“Ya pasti, itu kan berkaitan dengan SDM jadi ketika menyeleksi calon legislatif caleg itu kita kan melihat dari kapasitas kapabilitas kemampuan dan pengetahuan termasuk pengetahuan di dalamnya tentang lingkungan jadi ini bagian ya bukan fokus ke lingkungan saja tapi bagian dari fokus rekrutmen caleg itu, ya pasti (punya nilai plus ketika memiliki kepekaan terhadap lingkungan hidup)”.

Cara partai Gerindra merekrut dan melatih orang untuk posisi di eksekutif dan legislatif terkait kepekaan terhadap lingkungan hidup dengan disisipkan di dalam orientasi partai yang prosesnya calon-calon tadi di kenalkan dengan partai terlebih dahulu, kemudian pendidikan dan pelatihan, dan bekerja selama enam bulan yang di dalamnya terdapat pendalaman dua kali dari partai untuk menentukan apakah layak atau tidak.

“...kita dadar kita orientasi dulu. Apa itu partai GERINDRA apa itu dan pengetahuan dia kita tampung dulu satahu dia dulu habis itu kita diklat oh sebenarnya partai GERINDRA seperti ini. Terus apa tujuan utamanya? Apa yang harus dilakukan abis itu pendalaman setelah dikasih tahu dia bekerja selama 6 bulan kita dalami pendalaman pertama pendalaman kedua baru nanti dari kita coba penilaian apakah itu layak atau tidak ini kan masih bacaleg nih kalau setelah jadi caleg/legislatif tentu kita

supporting menyiapkan datanya piye corone memenangkan dan sebagainya. Ada materi tentang lingkungan hidup, saya lagi nyusun itu.”

4. Mengawasi dan Mengontrol Pemerintah: pengawasan (relasi eks-legislatif mutual independen, relasi *check and balances*)

Partai Gerindra bisa dikatakan memiliki perhatian yang lebih terkait lingkungan hidup ketika mengawasi dan mengontrol pemerintah disebabkan juga karena di Kota Semarang ini ketika mengangkat isu lingkungan hidup memiliki sisi positif guna meningkatkan popularitas partai.

“...maka lingkungan hidup di Kota Semarang ini menjadi bagian yang sangat strategis untuk menjadi isu untuk meningkatkan popularitas partai salah satunya lewat lingkungan hidup itu.”

Cara partai Gerindra mengawasi dan mengontrol pemerintah terkait lingkungan hidup

sama seperti isu-isu yang lain tidak memiliki cara khusus.

“...alurnya sama denga isu-isu yang lain.”

Manarik dicermati adalah Ketua Dewan Pembina Cabang partai Gerindra Kota Semarang tidak familiar dengan istilah *good environmental governance* dan beliau juga mengatakan bahwa di partainya pun istilah tersebut tidak terdengar. Kemudian terkait komitmen Ketua DPC untuk membawa partai dan kadernya lebih peka terhadap lingkungan hidup di angka delapan dari skala sepuluh (angka paling tinggi menunjukkan komitmen lebih tinggi).

Faktor Penghambat

Menurut Ketua DPC faktor penghambat ketika menjalankan fungsi partai adalah soal anggaran dan sumber daya manusia. Anggaran tidak bisa langsung turun begitu saja untuk mengatasi persoalan, menurutnya butuh waktu proses penganggaran untuk dilaksanakan di tahun berikutnya. Sumber daya manusia terkait ketika ada

permasalahan lingkungan masyarakat tidak melihat secara utuh dan mengabaikan perannya, padahal menurut beliau persoalan lingkungan hidup adalah persoalan bersama jadi tidak hanya dilimpahkan ke pemerintah saja atau partai tetapi kerja bersama yang tentunya dilandasi kesadaran.

Analisis Faktor Penghambat

Anggaran yang terbatas menyebabkan pemerintah sudah memposkan anggaran dan tidak memiliki anggaran yang dapat digunakan sewaktu-waktu kecuali bencana alam dan hal yang sangat penting, tetapi bisa juga karena tidak adanya kemauan politik yang kuat untuk menjadikan lingkungan hidup menjadi lebih baik.

Pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) memang masih menjadi pekerjaan rumah besar, tidak hanya pemerintah daerah tetapi pemerintah pusat. Kurang pemberian pengertian kepada masyarakat terkait menjaga lingkungan adalah tugas bersama termasuk di dalamnya partai politik lewat kader-kadernya.

Faktor Pendukung

Komunikasi di kota-kota besar memang berbeda ketika di daerah-daerah terpencil, kemudahan komunikasi dalam menjalankan fungsi partai sangat strategis guna meneruskan ide-ide atau pun program-program pemerintah lewat kader partai pendukungnya.

Analisis Faktor Pendukung

Perbedaan tingkat pendapatan dan terpaparnya masyarakat dengan gawai terlebih di kota besar seperti Semarang, menjadikan komunikasi bukan hal yang sulit dilakukan, tinggal bagaimana mengemasnya menjadi lebih informatif dan mengajak untuk lebih peduli.

KESIMPULAN

Fungsi partai politik sangat strategis guna membawa arah kebijakan lebih baik, jika fungsi dimaksimalkan maka kerja pemerintah juga ikut terbantu, terlebih terkait lingkungan hidup yang butuh usaha bersama, ekstra, dan konsisten. Sebab, kita sama-sama

tahu bahwa isu lingkungan hidup semakin hari semakin hangat diperbincangkan dan bukan hanya diperbincangkan tetapi kita sudah mulai merasakan dampak negatif dari kerusakan yang telah kita buat. Partai Gerindra partai yang bisa dibilang cukup baru sudah menunjukkan menurut klaimnya bahwa partai Gerindra perhatian lewat jawaban yang dijabarkan berdasarkan indikator fungsi partai terkait lingkungan hidup. Semoga partai lainnya juga sama bahkan lebih awas terhadap lingkungan hidup.

1. Partai lebih bisa memaksimalkan perannya terkait fungsi partai sebab jika terjadi partai itu juga yang akan mendapat perhatian masyarakat dan akhirnya popularitas dan tingkat keterpilihan diharapkan meningkat.
2. Pentingnya anggaran harus didukung lewat regulasi yang tidak harus menunggu tahun berikutnya ketika terjadi masalah lingkungan hidup tetapi bisa secepatnya, harus ada regulasi yang mengatur

penggunaan anggaran guna merespon kerusakan lingkungan hidup sesegera mungkin.

3. Pendidikan masyarakat harus dimasifkan tidak harus lewat formal tetapi lewat informal juga, khususnya terkait tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada pihak yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini yakni Bapak Joko Santoso selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Semarang

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Ichlasul. (1996). *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Belbase, Narayan. (2010). *Good Environmental Governance in the Future Constitution*. Nepal: IUCN.
- Bryce, James. (1888). *The American Commonwealth*. London: Liberty Fund, Inc.
- Budiardjo, Miriam. (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiati, Lilin. (2012). *Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Creswell, John W. (2017). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Downs, Anthony. (1957). *An Economic Theory of Democracy*. New York: Harper & Row.
- Fredrich, Carl J. (1950). *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*. Boston: Ginn and Company.
- Hasan, M. Iqbal. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Joseph La Palombara dan Myron Weiner (Eds). (1966). *Political Parties and Political Development*. Princeton: Princeton University Press.
- King, Dwight. (2003). *Half-Hearted Reform: Electoral Institutions and the Struggle for Democracy in Indonesia*. Westport: Praeger.
- Klingemann, Hans Dieter, dkk. (2000.) *Partai, Kebijakan dan Demokrasi. (Sigit Jatmika, Terjemahan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Meny, Yves dan Andrew Knapp. (1998). *Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany (3rd ed)*. Oxford: Oxford University Press.

N.H.T Siahaan. (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.

Pamungkas, Sigit. (2011). *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.

Ranney, Austin dan Willmoore Kendall. (1956). *Political Parties. Democracy and the American Party System*. New York City: Harcourt, Brace and Company.

Rossiter, Clinton. (1960). *Parties and Politics in America*. Ithaca: Cornell University.

Sartori, Giovanni. (1976). *Parties and Party Systems*. Cambridge: Cambridge University Press.

Schattschneider, E.E. (1942). *American Government in Action Party Government*. New York: Rinehart & Company.

Subagyo, P. Joko. (2006). *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2021

Daerah Rawan Bencana. (2022). Dalam <http://bcbd.semarangkota.go.id/pages/daerah-rawan-bencana>. Diunduh pada tanggal 30 Juni.